

KEPENTINGAN ELIT DALAM PT RIAU AIRLINES TAHUN 2002-2013

SHARIYANI

Email: shariyaani@gmail.com

Pembimbing: Hasanuddin

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Binawidya, Jl. H. R. Soebrantas Km 12,5 Simpang Baru Panam
Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract:** The interests of elite on PT Riau Airlines Year 2002-2013. PT Riau Airlines (PT RAL) is one of the loss-making enterprises Riau province reached 99%. This number is the highest number compared to 6 other enterprises in the province of Riau. The failed of PT RAL, because there is any the bankruptcy proceeding by one of the vendors. The lawsuit is done because of the amount of debt piling up and is due payment. The influence of the power elite in the form of interests has a very big influence on this situation. This paper aims to describe the forms of these interests. These interests include, rational elite interests and subjective elite interests. The method used is the qualitative method. The results showed that of the overall shape of the interest on the formation and development of PT RAL, there are 10 elite interests subjective and 5 rational elite interests. The dominance of elite interests since the beginning of the establishment of the basis of losses to the failed of PT RAL.*

***Keywords:** Interest, rational, subjective*

PENDAHULUAN

Inisiasi pembentukan PT RAL berangkat dari telah disahkannya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dari lahirnya UU ini ialah setiap daerah di Indonesia berhak menjalankan urusan rumah tangganya sendiri-sendiri. Termasuk meningkatkan kas daerah dengan membuka peluang usaha. Pada pasal 79 UU No. 22 Tahun 1999, disebutkan bahwa pendapatan daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih lanjut dikatakan bahwa PAD dapat pula berasal dari Badan Usaha Milk Daerah (BUMD). Legalitas bagi daerah untuk

membentuk suatu BUMD ialah dipertegas dalam Pasal 84 UU No. 22 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut disampaikan bahwa Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah.

Atas dasar itu sampai tahun 2013 Provinsi Riau telah memiliki BUMD sebanyak 7 buah BUMD. Namun cukup disayangkan keseluruhan BUMD yang ada di Provinsi Riau mengalami kerugian mencapai 80-99%. Berikut BUMD Riau beserta Laba/Ruginya:

**Tabel 1. Laba/Rugi BUMD Riau
Sampai 2013**

No	Nama Perusahaan	laba/ rugi
1	PT. Bank Riau Kepri	100%
2	PT. Riau Petroleum*	-
3	PT. SPR	-79%
4	PT. PIR	-95%
5	PT. Jamkrida Riau	-95%
6	PT. Permodalan Ekonomi Rakyat	-83%
7	PT. Riau Airlines	-99%

Sumber: Diolah Dari Laporan Bagian
BUMD Propinsi Riau

Ket:

* Data belum diolah

(-) Kerugian

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa kerugian terbesar di alami oleh PT RAL yakni kerugian mencapai 99%. Hasil penghitungan ini berangkat dari perbandingan Modal Pemprov bagi setiap BUMD dengan jumlah deviden dari setiap BUMD yang diberikan kepada Provinsi Riau. Khusus PT RAL, penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi Riau mencapai Rp. 149,7 miliar. Pernyataan modal tersebut hampir setiap tahun mulai dari tahun 2002-2012. Sedangkan deviden yang baru diberikan oleh PT RAL kepada Riau sebesar Rp. 655 juta.

Kerugian terus dialami PT RAL dalam perkembangannya. Data dari Harian Media Riau Tanggal 28 Januari 2015 menyatakan bahwa sampai tahun 2013 utang PT RAL mencapai Rp. 305 miliar, dengan rincian Rp. 90 miliar kepada Bank Mu'amalat, Rp. 130 miliar kepada vendor, Rp. 70 miliar utang pajak. Disisi lain sumber keuangan PT RAL sebenarnya juga sangat maksimal didapatkan dari para pemegang saham. Berikut pemegang saham PT RAL

beserta jumlah saham yang ditanamkan sampai tahun 2013:

**Tabel 2. Jumlah Saham Dari
Pemegang Saham PT RAL**

No	Pemegang Saham	Jumlah Saham (Rp.)
1	Riau	149.700.000.000
2	Lampung	100.000.000
3	Kampar	5.000.000.000
4	Bengkalis	8.000.000.000
5	Inhil	1.500.000.000
6	Rohil	1000.000.000
7	Pelalawan	2.450.000.000
8	Bintan	22.752.587.400
9	Natuna	9.500.000.000
10	Kuansing	3.250.000.000
11	Bangka	1.000.000.000
12	Rohul	2.900.000.000
13	Inhu	100.000.000
14	Lingga	3.000.000.000
15	Nias	6.000.000.000
16	Kerinci, Jambi	6.000.000.000
17	Pekanbaru	2.700.000.000
18	TPI	2.000.000.000
19	Batam	2.000.000.000
20	Dumai	6.227.023.920
Jumlah		240.843.640.760

Sumber: Laporan BUMD Propinsi
Riau Tahun 2013

Sesuatu yang terjadi di PT RAL dengan sumber keuangan maksimal tapi tetap menyumbangkan kerugian ialah terjadi karena adanya campur tangan elit dalam manajemen PT RAL yang pada akhirnya PT RAL menjadi *collapse*. Campur tangan elit tersebut didominasi oleh Gubernur Provinsi Riau beserta dewan komisaris yang juga merupakan orang kepercayaan Gubernur Riau. Riau dalam perjalanan usaha PT RAL adalah pemegang saham mayoritas dengan jumlah akhir sebesar 62,16%.

Ivan Yustivandana menyatakan perusahaan tidak akan mampu berjalan

dengan baik apabila terdapat intervensi, sekalipun dari pemegang saham mayoritas. Kemandirian perusahaan menjadi modal awal untuk mengembangkan usaha. Fungsi dari pemegang saham hanyalah mengontrol apakah nantinya direksi selaku penjalannya usaha bekerja untuk kepentingan rakyat atau tidak. (Yustivandana, 2008:6-7)

Atas dasar ini Peneliti ingin mengetahui lebih dalam kepentingan apa yang sebenarnya terjadi didalam tubuh PT RAL oleh para elit dalam hal ini Gubernur Riau bersama dewan komisaris yang merupakan orang kepercayaan Gubernur Riau. Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul penelitian ini dengan rumusan masalah: Bagaimanakah kepentingan elit dalam PT Riau Airlines Tahun 2002-2013?

TUJUAN DAN MANFAAT

Secara umum Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kepentingan apa yang terjadi dalam PT RAL. Sedangkan manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini dilihat dari tiga aspek, meliputi:

- a. Pemerintah; sebagai bahan masukan untuk memahami kondisi PT RAL serta dalam upaya pengembangan BUMD selanjutnya khususnya PT RAL.
- b. Peneliti; memantapkan kemampuan analisa atas ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan untuk diterapkan secara konkrit terhadap suatu masalah yang ada di Pemerintahan.
- c. Umum; sebagai bahan masukan untuk menambah wawasan terhadap adanya proses politik yang cukup penting dalam perkembangan BUMD khususnya PT RAL.

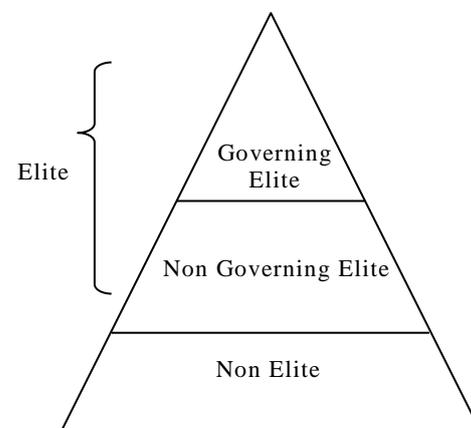
TEORI

1. Elit Politik

Banyak para tokoh sosiologi yang berbicara tentang elit. Mulai dari Pareto, Mosca, Lasswell, Mills, dll. Dalam penelitian ini mengenai elit lebih ditekankan kepada apa yang disampaikan oleh Pareto. Pareto menyampaikan bahwa elit sebagai suatu posisi di dalam masyarakat tepatnya berada di puncak struktur-struktur sosial yang penting, yaitu posisi tinggi dibidang ekonomi, Pemerintahan, militer, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas. (Haryanto, 2005: 68)

Kemudian Pareto membagi elit menjadi dua, yakni *Governing elite*, *Non Governing elite*, dan *Non elite*. Perbedaan keduanya terletak dari pengaruh yang bisa dihasilkan. Dan pengaruh yang paling besar ialah dimiliki oleh *governing elite*. Para elit yang tergabung didalam kategori ini lebih secara leluasa meletakkan kepentingannya. Berbeda dengan elit yang masuk kedalam kategori *non governing elite*, elit dalam bagian ini tidak memiliki wewenang penuh seperti yang dimiliki oleh elit sebelumnya. Jumlah elit dalam *non governing elite* pun sedikit. Berikut gambar mengenai piramida elit Pareto:

Gambar 1. Piramida Elit Pareto



Sumber: Haryanto (2005: 75)

2. Kekuasaan

Sama hal dengan elit, kekuasaan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari elit politik juga banyak yang menyumbang berbagai definisi. Salah satu diantaranya adalah Ilmuan politik asal Indonesia Profesor Miriam Budiardjo. Menurut Miriam Budiardjo bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. (Budiardjo, 2012: 15)

3. Tindakan Sosial

Salah satu ilmuan yang menyatakan tentang tindakan sosial adalah Talcott Parsons. Pandangannya tentang tindakan manusia bersifat voluntaristik, artinya karena tindakan itu didasarkan pada dorongan kemauan, dengan mengindahkan nilai, ide dan norma yang disepakati. Tindakan sosial menurut Parsons terbagi menjadi dua yakni tindakan rasional dan tindakan dengan orientasi subjektif. Tindakan rasional diartikan sebagai tindakan individu manusia memiliki kebebasan untuk memilih sarana (alat) dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma. (Wagiyo, 2007: 27)

Selain aktor baik secara individu maupun kelompok yang coba bertindak secara rasional menurut Parsons, Perlu diketahui bahwa selain hal-hal tersebut di atas, tindakan individu manusia juga ditentukan oleh orientasi subjektifnya, yaitu berupa orientasi motivasional dan orientasi nilai. Tindakan individu tersebut dalam

realisasinya dapat berbagai macam. (Sunarto, 2004: 65)

METODE

Metode penelitian yang peneliti pakai dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif analisis dan dengan jenis penelitian kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan nantinya bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari wawancara, dokumen, catatan memo, dan lainnya. Lebih lanjut Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa metode kualitatif sudah melekat pada analisis diskriptif. Lebih jelasnya Penelitian kualitatifkan diartikan sebagai jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik (Ahmadi, 2014: 14)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepentingan Elit Rasional dan Kepentingan Elit Subjektif

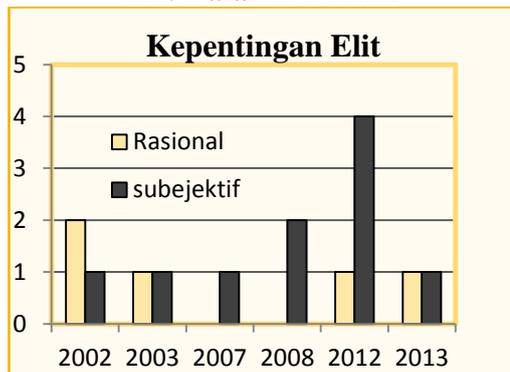
Hasil penelitian ini secara umum menggambarkan adanya kepentingan elit secara mendalam dalam manajemen PT RAL. Kepentingan tersebut dimasuki oleh Gubernur Provinsi Riau dan dewan komisaris yang juga merupakan orang kepercayaan Gubernur Riau. Kepentingan tersebut terjadi dalam dua masa, yaitu dalam pembentukan PT RAL dan dinamika perkembangan PT RAL. Kepentingan yang ada juga terbagi menjadi dua, yakni kepentingan elit rasional dan kepentingan elit subjektif.

Kepentingan elit rasional menggambarkan bahwa elit yang terlibat dalam manajemen PT RAL secara langsung maupun tidak secara langsung menempatkan kepentingan yang benar-benar sesuai dengan nilai yang berlaku, sedangkan kepentingan

elit subjektif ditandai dengan adanya kepentingan bagi diri pribadi atau untuk sekelompok lainnya yang memiliki hubungan baik dengan elit yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa mulai dari masa pembentukan PT RAL sampai dinamika perkembangan PT RAL jumlah kepentingan elit subjektif lebih besar daripada jumlah kepentingan elit rasional Terdapat 10 kepentingan subjektif dan 5 kepentingan rasional. Hasil penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar grafik berikut:

Gambar 2. Akumulasi Kepentingan Elit Dalam PT RAL



Sumber: Analisa

Data tersebut menggambarkan banyaknya kepentingan subjektif yang terjadi di PT RAL yang pada akhirnya menyebabkan PT RAL *collapse*. Bagaimana bentuk kepentingan-kepentingan tersebut yang terbagi menjadi dua yakni kepentingan rasional dan kepentingan subjektif, telah peneliti himpun dalam tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Penelitian

Kepentingan Elit	
Rasional	Subjektif
Pembentukan PT RAL atas dasar kemajuan Provinsi Riau	Menempatkan Karyawan, direksi, sampai komisaris atas dasar rekomendasi

Menjalankan tugas legislasi	Pemecatan Captain Yunus Bachri tidak dengan aturan yang benar
Pemecatan Captain Yunus Bachri atas dugaan kasus korupsi	Pengalihan Laba 50% kepada para pemegang saham
Membentuk Tim Penyelamatan PT RAL	Pemberhentian Heru tidak dengan aturan yang benar
Membentuk Tim Percepatan Penyelamatan PT RAL	Mengganti rute penerbangan
	Komposisi Tim di dominasi Pejabat Pemprov (hampir 50%)
	Menunjuk PT PIR sebagai investor baru PT RAL
	Menambahkan 4 unit turbin eks PT CPI ke PT PIR
	Selaku pemegang saham PT PIR, hendak mengambil saham penuh PT RAL (67%:33%)
	Komposisi Tim di dominasi Pejabat Pemprov (50%)

Kepentingan Elit Dalam Masa Pembentukan PT RAL

Dalam pembentukan PT RAL kepentingan yang ada ialah kepentingan yang berbentuk rasional dan juga subjektif. Kepentingan rasional ditandai dengan inisiasi dari Gubernur Riau Saleh Djasit dalam pembentukan PT RAL dengan maksud hendak memajukan ekonomi

kerakyatan bagi masyarakat Provinsi Riau. Saleh Djasit beranggapan bahwa dengan adanya transportasi udara jarak-jarak jauh antar daerah di Riau bisa terhubung secara maksimal dan akhirnya juga mampu menjalankan roda ekonomi secara maksimal.

Analisa Saleh Djasit memang sesuai dengan situasi dan kondisi Riau saat itu. Luas wilayah Riau pada tahun 2000 ialah 329.867,61 km² dengan jumlah 12 Kabupaten/Kota. Jarak tempuh yang akan dilalui ketika melalui jalur darat ialah mencapai 5-8 jam. Jadi alasan demikian ialah cukup rasional. Ditambah lagi dalam pembahasan bersama DPRD Riau mengenai pembentukan PT RAL, RAL dituntut berdiri mandiri dengan menjadikannya sebagai Perseroan Terbatas (PT) agar mampu maksimal mencapai apa yang Saleh Djasit inginkan atas pembentukan PT RAL. Namun dalam perkembangannya, kepentingan tersebut berubah menjadi kepentingan dengan orientasi subjektif.

Kepentingan elit subjektif dalam masa ini ditandai dengan penempatan dewan komisaris, direksi, dan para karyawan dengan cara rekomendasi dan menempatkan langsung orang-orang dekat Gubernur Riau saat itu. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Saleh Djasit, bahwa alasan mengapa pada masa pembentukan PT RAL Pemprov menempatkan dewan komisaris berasal dari orang-orang terdekat adalah agar mempermudah koordinasi.

Kepentingan Elit Dalam Dinamika Perkembangan PT RAL

Peroses yang panjang cukup mewarnai masa ini. Masa dinamika perkembangan PT RAL diawali dari tahun 2003 sampai 2013. Pada tahun

2003 sebagai tahun awal proses PT RAL, direktur utama yang dipilih atas dasar rekomendasi atau hubungan baik dan tidak dengan *fit and propertest*, tersangkut kasus korupsi sebesar Rp. 1 miliar. Inilah dampak dari kepentingan elit subjektif dari Gubernur Riau saat masa ini. Menempatkan orang-orang kepercayaan tanpa studi kelayakan yang jelas maka wajar saja calon yang dipilih tanpa melalui mekanisme yang benar tidak akan bekerja maksimal. Atas pertimbangan bahwa Dirut PT RAL Captain Yunus Bachri melakukan tindakan korupsi dan akan berdampak panjang atas manajemen PT RAL maka Yunus Bachri diberhentikan dari jabatannya.

Pemecatan Yunus Bachri ternyata tidak sesuai dengan mekanisme yang jelas. Dalam Pasal 91 UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, bahwa anggota dewan direksi akan diberhentikan berdasarkan RUPS, keputusan ini pun hanya dapat diambil jika yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pada kenyataannya Yunus Bachri hanya dilayangkan surat dari dewan komisaris atas pemberhentiannya sebagai direktur utama. Kejadian ini jelas menggambarkan bahwa kebijakan dewan komisaris yang demikian adalah upaya menampakkan kepentingan agar Yunus Bachri segera dipecat dan langsung dapat digantikan dengan yang lain.

Kepentingan subjektif terjadi lagi setelah ini, Direktur utama akhirnya terpilih dan kembali lagi tidak melalui mekanisme yang benar seperti apa yang sudah diatur dalam perda pembentukan PT RAL, bahwa direksi harus diangkat dengan melalui RUPS dan dengan uji kelayakan yang harus dilakukan dengan pihak lainnya tidak hanya dari dewan direksi. Pihak pihak

yang seharusnya terlibat dalam tahap penentuan calon direksi adalah:

1. Pemegang saham sesuai urutan besarnya penyertaan saham yang memiliki saham sekurang-kurangnya 5 % dari modal dasar.
2. DPRD Provinsi Riau.
3. Direktorat Sertifikat dan Kelaikan Udara (DSKU) Direktorat Jenderal perhubungan Udara.

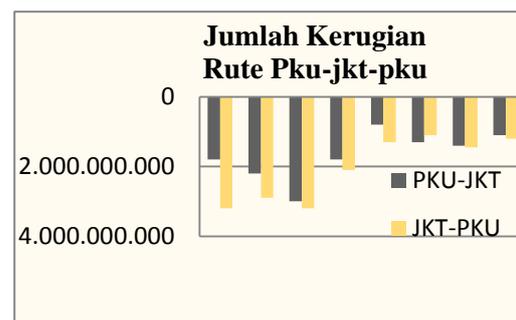
Pada masa selanjutnya PT RAL mampu memberikan keuntungan dengan laba sebesar Rp. 9.082.069.492. Namun lagi-lagi dewan direksi kembali masuk keranah yang cukup penting. Keuntungan yang dihasilkan oleh PT RAL diusulkan untuk dibagi-bagi kepada para pemegang saham. Jumlah pembagian laba tersebut meliputi:

1. 50% dari laba perseroan diperuntukkan kepada para pemegang saham secara proporsional sebagai deviden
2. 20% dari laba perseroan diperuntukkan kepada pengurus dan karyawan sebagai pembayaran bonus atau jasa produksi.
3. 30% dari laba perseroan diperuntukkan sebagai laba ditahan untuk kepentingan operasi perusahaan.

Namun tidak berlangsung lama pada tahun 2007 Heru nurhayadi direktur utama yang terpilih setelah diberhentikananya Captain Yunus Bachri juga diberhentikan karena ada kesenjangan antara Heru dengan para karyawan. Heru banyak menghasilkan aturan-aturan tegas yang tidak disukai oleh para karyawan. Akhirnya karyawan bergejolak, dan Heru yang akhirnya dipilih untuk diberhentikan. Sejatinya ini adalah dampak dari para karyawan yang didominasi oleh orang-orang titipan pemerintah.

Heru Nuhayadi lalu digantikan oleh Samudra Sukardi yang benar-benar dipilih melalui *fit and propertest*. Pada masa kepemimpinan PT RAL oleh Samudra Sukardi, Dewan direksi kembali menempatkan kepentingan subjektifnya. Dewan direksi meminta untuk mengubah jalur penerbangan sampai ke Jakarta yang merupakan jalur padat. Kebijakan ini benar-benar sangat berani. Pada akhirnya terjawab dari data yang didapatkan dari laporan keuangan PT RAL. Tumpukan utang PT RAL menumpuk sebab kebijakan tersebut. Berikut data yang dapat menggambarkan kerugian PT RAL:

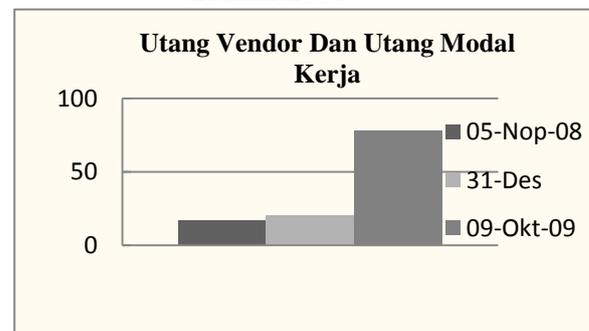
Gambar 3 Kerugian Rute PKU-JKT-PKU



Sumber: Laporan Keuangan PT RAL Tahun 2009

Peningkatan kerugian PT RAL juga tampak meningkat sekali pasca kebijakan ini. Dapat dilihat pada grafik utang usaha PT RAL sebagai berikut:

Gambar 4 Peningkatan Utang Tahun 2009



Sumber: Laporan Keuangan PT RAL Tahun 2009

Atas dasar semakin menumpuknya utang yang ada didalam PT RAL, Gubernur Riau langsung berperan dengan membentuk Tim Penyelamatan PT RAL. Hal yang cukup disayangkan adalah dalam kondisi ingin memporoleh solusi jitu untuk mengubah posisi PT RAL dari keadaan krisis menjadi lebih baik, Gubernur Riau tetap saja menempatkan kepentingan subjektifnya. Berdasarkan SK yang dikeluarkannya dengan nomor Kpts.276/III/2012 tepatnya pada tanggal 27 Maret 2012, komposisi Tim Penyelamatan lebih didominasi oleh pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Keseluruhan Tim juga mendapatkan honorarium dari anggaran APBD. Dominasi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4 Komposisi Tim Penyelamatan PT RAL

No	Instansi	Jmlh (org)
1	Sekda Riau	8
2	PT RAL	3
3	Profesional	2
4	DPRD Riau	2
5	Dinas Perhubungan Riau	1
6	BPMPD Riau	1
7	Akademisi	1
Total		18

Sumber: SK Gubri Nomor: Kpts.276/III/2012

Kerugian demi kerugian terus terjadi. Sampai pada akhirnya Gubernur Riau kembali berperan dengan menunjuk investor baru yang berasal dari BUMD Provinsi Riau. BUMD tersebut adalah PT Pengembangan Investasi Riau (PT

PIR). PT PIR berasal dari data keuangan BUMD Riau termasuk salah satu BUMD yang juga merugi. (Lihat Tabel 1)

Posisi Pemerintah Provinsi Riau didalam PT PIR adalah sebagai pemegang saham mayoritas mencapai 90% atas nama Gubernur Rusli Zainal. Sisa 10% adalah milik saham Kabupaten Rokan Hilir atas nama Anas Maamun. Ketika di runut lagi bahwa terlibatnya PT PIR menjadi investor baru PT RAL sejatinya hanyalah bentuk penempatan kepentingan dengan orientasi subjektif. Hal ini dapat dilihat dari apa yang menjadi alasan PT PIR membantu PT RAL.

Dalam surat rencana PT PIR membantu PT RAL yang dituju kepada Gubernur Riau, dikatakan bahwa PT PIR akan mendapatkan 4 unit turbin eks PT CPI sebagai aset untuk PT PIR. Tidak hanya itu atas bantuan ini pula PT PIR mendapatkan dana APBD dua kali dalam satu tahun, yakni tahun 2012 sebesar Rp. 70 miliar. Tidak hanya itu dalam surat tersebut dinyatakan bahwa PT PIR akan mengambil saham PT RAL mencapai 66,66%, sisanya yakni 33,33% ialah saham milik Provinsi Riau. Jadi semua saham dari pemegang saham non-pempron akan di *takeover* dan hanya terdapat 2 pemegang saham. Yakni PT PIR dan Pemerintah Provinsi Riau.

Kebijakan ini jika ditelaah lebih dalam terlihat adanya upaya pemilikan secara penuh akan usaha PT RAL. Sebelumnya PT RAL mampu memeberikan untung yang baik. Atas dasar ini Gubernur Riau masih sangat

meyakini bahwa PT RAL kedepannya akan mampu menghasilkan. Sehingga nantinya jika benar berjalan dengan lancar Gubernur Riau akan mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Sebab, saham terbesar PT PIR sejatinya milik Pemerintah Riau atas nama Gubernur sebesar 90%, dan Saham PT RAL sisa dari kepemilikan PT PIR juga milik Provinsi Riau. Artinya atas usaha PT RAL, 100% Provinsi Riau atas nama Gubernur Riau sebagai pemilik sahamnya. Jadi jika ada keuntungan lebih atas usaha PT RAL, Riau satu-satunya yang akan mendapatkan keuntungan.

PT PIR terus menjalankan tugasnya untuk memperbaiki keadaan yang ada di PT RAL. Namun tepat pada tanggal 12 Juli 2012 Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) selaku kreditur utama PT RAL dalam hal penyewaan pesawat, menggugat PT RAL di Pengadilan Niaga Medan karena sampai tahun 2012 tidak menepati janji untuk membayar utang yang telah disepakati pembayarannya jatuh tempo pada tahun tersebut. PT PR akhirnya melayangkan surat kepada BMI tentang proposal penyelamatan PT RAL. Surat tersebut bernomor 216A/PIR/VII/2012. Isi surat tersebut secara umum meminta BMI mencabut pailit yang dijatuhkan kepada PT RAL.

Keputusan tentang pailit PT RAL telah sampai kepada Mahkamah Agung (MA). MA pun akhirnya menyatakan bahwa PT RAL benar dalam keadaan pailit. PT RAL mencoba meminta kasasi kepada MA namun ditolak dan PT RAL tetap

dinyatakan pailit. Keputusan tersebut dinyatakan dalam surat putusan No. 622 K/Pdt. Sus/2012. Walau demikian Pemprov dan PT RAL terus berupaya.

Disisi lain, atas nama mengupayakan secara maksimal dicabutnya PT RAL dari pailit. Gubernur Riau Rusli Zainal kembali membentuk Tim Penyelamatan dengan nama Tim Percepatan Penyelamatan PT RAL yang kembali didominasi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Dominasi pejabat Pemerintah Provinsi Riau mencapai 50% dari Tim sebelumnya. Berikut komposisi Tim yang didominasi oleh pejabat-pejabat Pemprov :

Tabel 5 Komposisi Tim Percepatan Penyelamatan PT RAL

No.	Instansi	Jmlh (org)
1	Sekda Riau	11
2	PT RAL	2
3	PT PIR	4
4	DPRD Riau	2
5	Dinas Perhubungan Riau	2
6	BPMPD Riau	1
7	Akuntan Publik	1
Total		22

Sumber: SK Gubri No. Kpts.695/ IX/ 2013

Sejatinya pembentukan Tim Percepatan Penyelamatan PT RAL adalah bentuk tindakan yang rasional. Sebab perlu adanya orang-orang yang bisa bekerja sangat maksimal dan fokus dalam upaya penyelamatan PT RAL. Mengingat Tim sebelumnya juga tidak berjalan maksimal, namun yang disayangkan adalah dibalik

kepentingan rasional tersebut, Gubernur Riau dalam hal ini sebagai inisiator pembentukan Tim penyelamatan dan percepatan penyelamatan PT RAL menempatkan kepentingan subjektifnya. Menempatkan orang-orang pejabat Pemprov lebih dominan sebesar 50% daripada orang-orang profesional yang semestinya jauh lebih banyak.

Akhirnya tim bergerak bersama dan upaya dalam pencabutan pailit terus berlanjut. Sebelumnya pada tanggal 08 Maret 2013 PN Niaga Medan selaku pengadilan tingkat pertama pada kasus ini akhirnya mengabulkan pencabutan pailit dengan surat keputusan Nomor 01/PK/PM.Pailit /2013/ PN-Niaga Medan. Surat ini menjadi kartu hijau untuk PT RAL mencabut putusan MA atas putusan pailitnya PT RAL. Dan akhirnya MA sepakat mencabut status pailit PT RAL, Dalam putusan tersebut tepatnya pada tanggal 31 Desember 2013 Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari PT Riau Airlines dan membatalkan putusan MA No. 622 K/Pdt. Sus/2012 tentang penolakan kasasi PT RAL. Putusan ini memberi gambar bahwa PT RAL lepas dari status pailit.

SIMPULAN

Secara umum dari keadaan yang digambarkan oleh PT RAL, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan BUMD di Provinsi Riau juga mengalami hal yang sama. Dari data yang peneliti dapatkan tepatnya pada tabel 1.4 menggambarkan bahwa keseluruhan BUMD Provinsi Riau

merugi pada kisaran 80%-100%. Hanya satu BUMD yang bisa surplus yakni Bank Riau Kepri. Bank Riau Kepri mampu menghasilkan deviden yang baik sebab seluruh pegawai dilingkungan Pemerintahan Provinsi Riau Sampai Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau diarahkan untuk menjadi nasabah di Bank Riau Kepri. Belum lagi dengan para investor dan pihak-pihak lainnya yang tertarik dengan sendirinya menjadi nasabah di Bank Riau Kepri. Jadi, mundurnya kemampuan BUMD di Provinsi Riau untuk maju dan berkembang ialah dikarenakan Elit-Elit di Provinsi Riau terus saja menempatkan kepentingannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryanto. 2005. *Kekuasaan Elit*. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana PLOD UGM
- Sauqi, Yandri Rahman. 2013. *Analisis Politik Terhadap Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Riau (Studi Kasus: PT RiauAir Lines*. Tesis . Program Pasca Sarjana. Universitas Riau
- Sunarto, Kamanto. 2004. *Pengantar Sosiologi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Surya, Indra dan Yustiavandana. 2008. *Penerapan Good Corporate Governance*. Jakarta: Kencana
- Wagiyo. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Universitas Terbuka